



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720  
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421 /Kep. ~~099~~ /Disdik

#### TENTANG

IJIN PEMBAHARUAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TK. TUNAS ELOK  
KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pembaharuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS ELOK Kecamatan PASAR KEMIS;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pengukuhan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0811).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1314).

Memperhatikan :

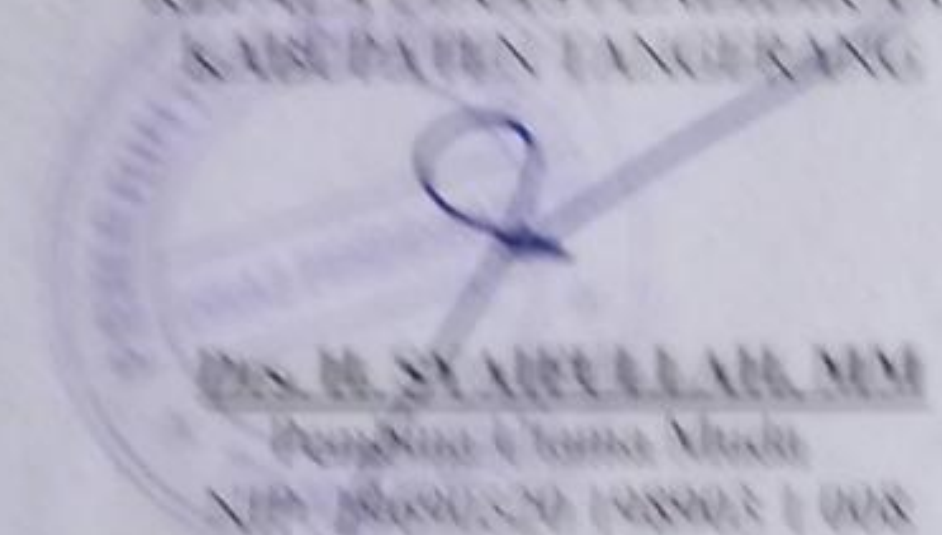
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821/2/Kep. 003-Buk/2019 Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alokasi Tugas Alokasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis (Daerah) (PPTD) Jabatan Administrator dan Jabatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Nomor 11881/11XNA/001/11KUKA/11M Nomor 10 Tanggal 14 Oktober 1998 Tentang Surat Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM SYAHMINA dan Yayasan PENSIKSIKAS TUNAS BLOK MUKLA kepada Yayasan TUNAS BLOK MUKLA;
3. Surat Pernyataan dari Ketua Yayasan Tuna Tika Abadi Nomor : 001/TEM.2/TK/IX/2019 Tanggal 19 September 2019 Perihal Pernyataan Perubahan Nama Yayasan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Yayasan menjadi Yayasan TUNAS BLOK MUKLA Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Program KAMUS KAKAK KAKAK ISLAM SYAHMINA di Perumahan Kumbani 5 Blok E 1 No. 1-1A Kecamatan Pasar Kumbi Kabupaten Tangerang;
- KEDUA** : Perubahan Nama Yayasan menjadi Yayasan TUNAS BLOK MUKLA ini sekaligus sebagai Unit Operasional Mengembangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten Nomor : 420.1/116/Disdik/2015 Tanggal 16 Maret 2015 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
- KETIGA** : TK ISLAM SYAHMINA ini berinisial sebagai Yayasan TUNAS BLOK MUKLA Akta Nomor 11881/11KUKA/11M Nomor 10 Tanggal 17 Juli 2018;
- KEEMPAT** : Yayasan TUNAS BLOK MUKLA dan Lembaga PAUD TK ISLAM SYAHMINA melakukan Pengujian Perpanjangan Unit Operasional & reamisi selanjutnya secara berkala sebagaimana tercantum pada dikam KETIGA, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD) DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA** : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti memuatnya;
- KEENAM** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KETUJU** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan penbenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019  
KEPALA YAYASAN PENSIKSIKAS  
KABUPATEN TANGERANG

  
Dis. H. SYAIRULLAH, MM  
Ketua Yayasan  
NIP. 19690329 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta